

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA

PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja memiliki beberapa definisi, salah satunya berdasarkan UU No. 25 tahun 1997, tenaga kerja adalah tiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang atau melakukan pekerjaan, baik didalam atau diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan definisi menurut Simanjuntak (1998), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-16 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut pendapat Simanjuntak (1985), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Memang disetiap Negara batasan umur tenaga kerja berbeda-beda. Contohnya di India, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun. Selain golongan umur tersebut dianggap bukan tenaga kerja. di Indonesia tidak ada batasan umur

maksimal karena di Indonesia tidak ada jaminan sosial nasional. Memang ada sebagian penduduk yang menerima tunjangan hari tua tapi jumlah hanya sedikit, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta.

Menurut pendapat Suparmoko (2002), tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara dalam memproduksi barang atau jasa, tenaga kerja yang dalam usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Tiga golongan yang disebut pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak sedang bekerja mereka dianggap secara fisik maupun sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibatasi oleh umur. Dimana tiap-tiap Negara memberi batasan umur yang berbeda.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Kebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk domestik bruto (PDRB). Karena jumlah penduduk semakin besar maka semakin besar juga angkatan kerja yang akan mengisi produksi sebagai input

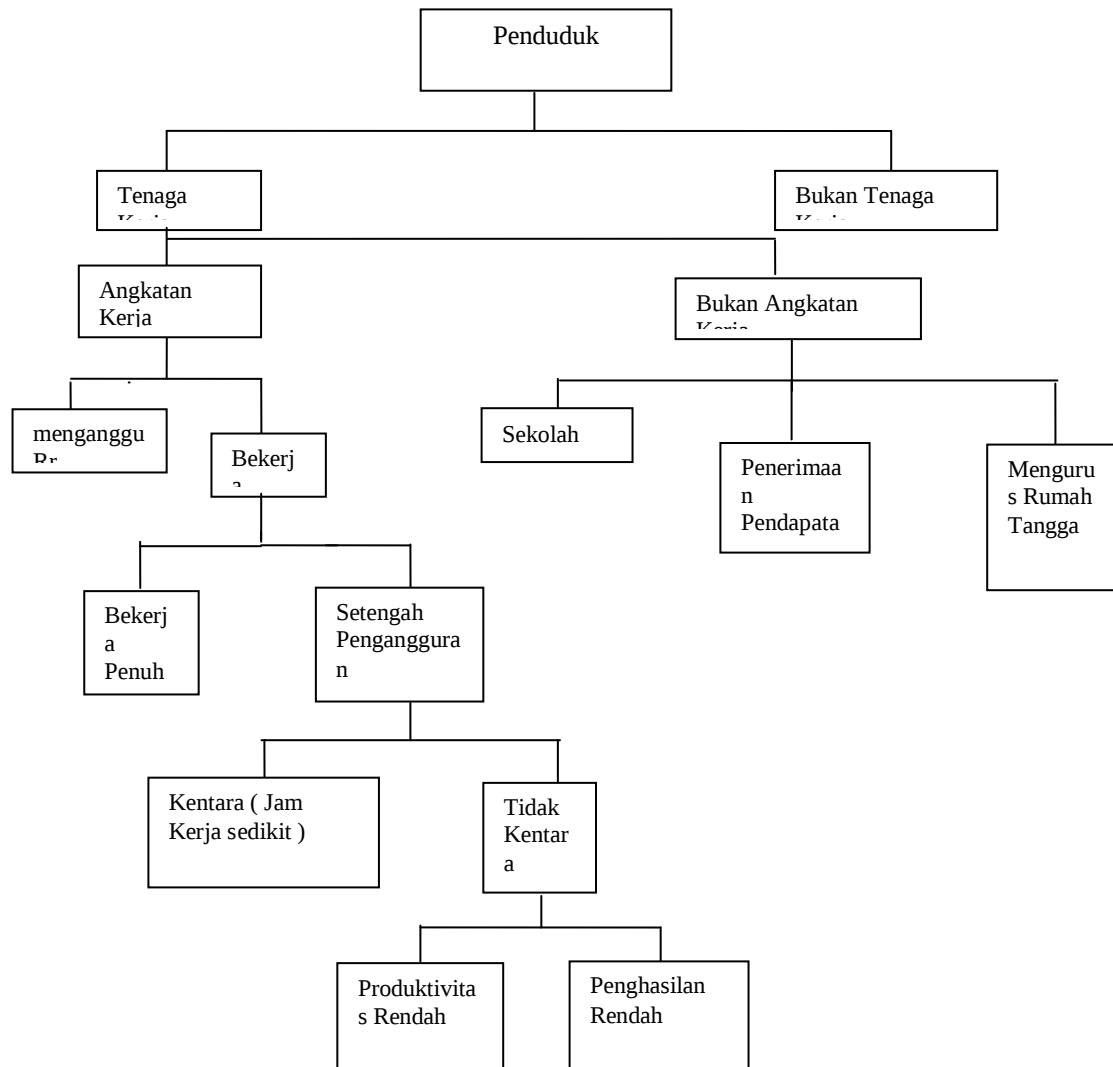
Semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa uang (upah) serta mereka yang bekerja untuk gaji dan upah. Golongan kerja meliputi mereka yang

menganggur, tetapi sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan (Djojohadikusumo,1995).

Menurut Dumairy (1996) pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang umur didalam batas usia kerja. Dari beberapa pengertian tenaga diatas, maka secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat dibedakan atas umur. Suatu Negara menetapkan batas usia minimum 15 tahun tanpa batas usia maksimum. Alasannya adalah Indonesia belum mempunyai jaminan sosial. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan dihari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang di terima tidak mencakupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagian penduduk usia pensiun biasanya masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan oleh sebab itu mereka tetap digolongankan sebagai tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya pengertian tenaga kerja dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Komposisi Penduduk Dan Tenaga Kerja



Sumber simanjuntak 1998.

2.1.1.1 Pengertian Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang aktif dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa serta mereka yang siap bekerja dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan.

Angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Biasanya juga disebut sumberdaya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Defenisi lain tentang angkatan kerja menyebutkan bahwa, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sebenarnya terlibat dalam kegiatan yang produktif, yaitu yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk mereka yang berusaha untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu masih ada arti lain yang menyebutkan bahwa setiap orang yang masih mampu menghasilkan barang atau jasa merupakan angkatan kerja meskipun telah melewati batas usia yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta dan termasuk usia pensiun.

Sehingga besarnya penyediaan atau *supply* tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Mereka dinamakan golongan yang bekerja, mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan mencari kerja dinamakan angkatan kerja atau *laborforce*. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau *deman* dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah (Simanjuntak, 1998).

Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur umur penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dalam suatu Negara atau suatu daerah sewaktu-waktu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dalam usia kerja ini disebut tingkat partisipasi kerja (Mulyani,2010)

1. Bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, yang lamanya bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu yang lalu (setianingrum,2008).

a) Bekerja Penuh

Bekerja penuh adalah mereka yang benar-benar bekerja secara penuh paling sedikit satu jam selama seminggu sebelum pencacahan.

b) Setengah Menganggur

di Negara yang sedang berkembang migrasi dan desa ke kota sangat pesat. Sehingga membuat tidak semua orang yang datang ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak pula bekerja penuh waktu, disamping itu adapula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula berkerja penuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu atau empat jam sehari. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti itu di golongan sebagai setengah menganggur atau underemployment (Sukirno, 2004).

Pekerja setengah menganggur adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan secara normal mampu dan ingin dikerjakannya (mulyadi, 2003).

a. Setengah Pengangguran Kentara

Setengah pengangguran kentara adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (*part time*) diluar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya biasanya, kurang dari 35 jam dalam seminggu (Mulyadi,2003)

b. Setengah Pengangguran Tidak Kentara

Setengah pengangguran tidak kentara adalah yang berproduktivitas kerja dan pendapatannya rendah. Jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mengembangkan seluruh keahliannya (Mulyadi 2003)

2. Mempunyai Pekerjaan Sementara Tidak Bekerja

Orang yang termasuk kategori ini adalah mereka yang selama satu minggu pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, antara lain.

- a) Pekerja tetap, yaitu pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, atau perusahaan dan atau kantor menghentikan kegiatan mereka.
- b) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu panen.
- c) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian, misalnya dokter, tukang cukur,dan lain sebagainya.

3. Mencari kerja atau Menganggur

Menganggur adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja atau melakukan suatu kegiatan ekonomi dan mereka berusaha mencari pekerjaan.

Menganggur dapat digolongkan sebagai berikut:

Mereka belum pernah bekerja atau pada saat pencacahan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

- 1) Mereka yang pernah bekerja tetapi pada saat pencacahan sedang menganggur atau berusaha mendapatkan pekerjaan.
- 2) Mereka yang sedang dibebastugaskan baik akan dipanggil kembali atau tidak tetap sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya pengangguran dapat dibedakan menjadi empat jenis pengangguran, antara lain (Sukirno, 2004)

1. Pengangguran Normal Atau Friksional

Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerjaan. Maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong pekerjaan untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan yang baru yang lebih tinggi gajinya dan sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yang disebabkan dari kondisi geografis, informasi, dan dari proses perkerutan yang panjang.

3. Pengangguran struktural

Pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang umumnya Negara berusaha dalam mengembangkan perekonomian dalam pola agraris ke industri.

4. Pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin, bahan kimia, dan kemajuan teknologi sehingga perusahaan mengurangi sebagian tenaga kerjanya.

Lalu kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya yang menerima pendapatan. Sewaktu-waktu ketiga golongan tersebut dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Maka dari itu kelompok ini disebut sebagai angkatan kerja potensial. Selain kelompok di atas masih ada yang disebut dengan pengangguran.

4. Bukan Angkatan Kerja

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yakni:

- 1) Golongan yang masih bersekolah
- 2) Golongan yang mengurus rumah tangga
- 3) Golongan lain-lain yaitu:
 - a) Penerimaan pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan sewa milik.
 - b) Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara, atau sakit kronis. (Simanjuntak, 1998).

2.1.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja bias di kaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, yang dimana permintaan tenaga kerja pasar dan penawaran tenaga pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Didalam dunia kerja atau dalam hal penyerapan tenaga kerja setiap sektornya berbeda-beda untuk penyerapan tenaga kerjanya, misalnya saja tenaga kerja di sektor formal. Penyeleksian tenaga kerjanya di butuhkan suatu keahlian khusus,

pendidikan keahlian dan pengalaman untuk bias bekerja pada sektor formal (Don Bellante and Mark Janson : 2006).

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002)

2.1.1.3 Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan pada konsumen. Akan tetapi bagi pengusaha mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan turunan.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya di dasarkan pada teori ekonomi neoklasik, dimana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*). Dalam hal memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Oleh karena itu permintaan adalah suatu hubungan antara harga dengan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja juga

hubungannya dengan antar tingkat upah (harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu.

Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat oleh barang yang diproduksi. Permintaan akan tenaga kerja yang seperti itu disebut *derived demand* (Simanjuntak, 1998).

Permintaan dan penawaran merupakan dua mata bilah gunting yang dibutuhkan untuk menganalisis pasar, oleh karena itu selain penawaran harus juga dipahami pula tentang permintaan tenaga kerja. Analisis tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkannya. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, analisis permintaan tenaga kerja biasanya bertopang pada teori produktivitas kerja.

Produksi persatu unit tenaga kerja disebut juga produksi rata-rata (PR_{TK} - APL). Angka ini di peroleh dari hasil bagi volume produksi dengan kuantitas masukan yang digunakan untuk menghasilkan atau merupakan indeks kemampuan menghasilkan dari masukan yang dipakai.

Bila disajikan dalam bentuk rumus, diperoleh:

$$PR_{TK} = \frac{Q}{TK} \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

PR_{TK} = Produksi per unit tenaga kerja

Q = Volume yang di produksi yang di hasilkan sebagai akibat dari penggunaan tenaga kerja

T = Banyaknya tenaga kerja yang digunakan

Produksi rata-rata akan menjadi lebih jelas bila dilihat dalam hubungannya dengan fungsi produksi karena ada keterkaitan secara fungsional antara Q dengan TK.

Dalam jangka pendek, hubungan antara Q yang dalam hal ini di cerminkan oleh PDRB dan TK secara simultan sebagai komponen perhitungan produktivitas, dilakukan dengan menganggap atau mengasumsikan bahwa tidak terjadi perubahan teknologi dan modal. Selanjutnya rumus produksi marginal dapat ditulis sebagai berikut:

$$PM_{TK} = \frac{cQ}{cTK} - \frac{dQ}{dT_K} - \frac{yQ}{yTK} \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana:

PM_{TK} = Produksi marginal

c, d, y = tanda perubahan

Besarnya permintaan tenaga kerja dapat ditunjukan oleh jumlah orang bekerja pada suatu saat. Dengan demikian, jumlah orang bekerja merupakan kesempatan kerja (Alfred dalam sudarsono, 1995)

Analisis permintaan tenaga kerja didasarkan atas asumsi bahwa permintaan pasar tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat atas barang dan jasa yang dibutuhkan. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya memproduksi barang dan jasa, dengan demikian analisis mengenai permintaan tenaga kerja didasarkan pada produktivitasnya.

$$D_{TK} = PROD_{turunan} \dots\dots\dots (2.3)$$

$$D_{TK} = f(Q_{TP}) \dots\dots\dots (2.4)$$

$$D_{TK} = f(PDRB) \dots\dots\dots (2.5)$$

$$PDRB = f(C, I, G, (X-M)) \dots\dots\dots (2.6)$$

$$D_{TK} = f(C, I, G, (X-M)) \dots\dots\dots (2.7)$$

Dimana:

D_{TK} = permintaan tenaga kerja

Q_{TP} = Kuantitas tingkat produksi

PDRB= Produk Domestik Regional Bruto

C = Konsumsi

I = Invetasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

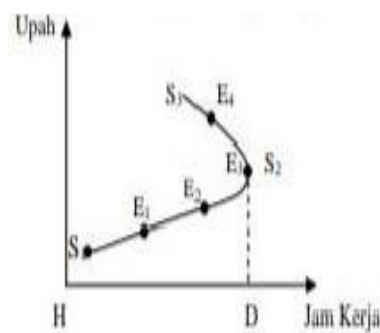
Secara umum, permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah tingkat produksinya (2.3).semakin besar produk yang dihasilkan maka semakin besar pula pendapatan yang diterima(2.4).tingkat pendapatan yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomin tersebut berjumlah banyak. Pendapatan yang diterima daerah dinamakan PDRB.jadi permintaan tenaga kerja secara langsung dipengaruhi oleh PDRB (2.5).sedangkan PDRB dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impr (2.6).oleh karena itu secara tidak langsung permintaan akan tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor impor (2.7)

2.1.1.4 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Apabila kita menyebutkan soal penawaran suatu komoditi, maka ia merupakan hubungan antara harga dan kuantitas komoditi itu yang para pemasok siap untuk menyediakannya. Sehubungan dengan tenaga kerja, penawaran adakah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Secara khusus, suatu kurva penawaran melukiskan jumlah maksimum yang siap disediakan pada setiap kemungkinan tingkat upah untuk periode waktu. Sebagai alternatif, kurva penawaran tenaga kerja dapat dipandang, bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja, sebagai tingkat upah minimum yang dengan tingkat itu para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakan jumlah yang khusus itu. Salah satu dari kedua pandangan itu, penawaran tenaga kerja harus ditinjau sebagai suatu skedul alternatif yang diperoleh pada suatu titik waktu tertentu yang ditetapkan.

Gambar 2.2

Fungsi Penawaran Tenaga Kerja



Sumber Simanjuntak, 1998

Efek substitusi ditunjukkan oleh titik E_1 hingga E_3 2.6 waktu yang disediakan bertambah sehubungan dengan pertambahannya tingkat upah (S_1 ke S_2) sesudah mencapai jumlah waktu bekerja HD jam, seseorang akan mengurangi jam kerjanya bila tingkat upah naik. Penurunan jam kerja sehubungan dengan pertambahan tingkat upah (penggal grafik S_2 S_3) dinamakan *backwardbending supply curve* atau kurva penawaran yang kerja membalik.

Backward bending supply curve hanya dapat terjadi pada penawaran tenaga kerja yang bersifat perorangan. Hal ini berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih luas, semakin tingginya tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah yang rendah akan bersedia untuk bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih tinggi (Supramoko, 1998).

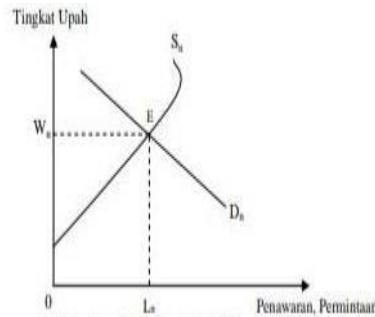
2.1.2 Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut (S_n). Demikian juga permintaan akan tenaga kerja dari suatu perusahaan merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Jumlah permintaan tenaga kerja di suatu daerah tertentu, adalah penjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut (D_n). Jumlah penawaran (S_n) dan permintaan (D_n) di daerah yang bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan jumlah penempatan untuk waktu-waktu berikutnya.

Perpotongan antara penawaran (S_n) dan permintaan (D_n) disebut titik ekuilibrium, menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja (L_n) dan tingkat upah yang berlaku (W_n)

yang kemudian di pakai sebagai patokan baik oleh keluarga maupun oleh pengusaha di daerah yang bersangkutan.

Gambar 2.3
Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja
Pada Suatu Daerah Atau Negara



Sumber simanjuntak, 1998

S_n dan D_n dalam gambar 2.4 dapat di pandang sebagai penawaran dan permintaan untuk suatu Negara. Penawaran untuk tenaga kerja dapat di pandang sebagai penjumlahan dari tiap-tiap daerah dalam Negara itu atau penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di Negara tersebut. Permintaan untuk suatu Negara dapat dipandang sebagai jumlah permintaan dari tiap-tiap daerah atau dari seluruh perusahaan yang ada di Negara tersebut.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

2.1.3.1 Defenisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah berdasarkan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak, serta mengembangkan jaminan sosial.

(Ichwan,1989) Pengeluaran pemerintah adalah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan dibidang pengeluaran.

(Soediyono:135) Dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah maka pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang bisa dianggap sebagai tingkat Full employment. Dengan demikian apabila dalam perekonomian terdapat deflationary gap pemerintah pada umumnya mengusahakan meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Begitupun sebaliknya apabila dalam perekonomian terdapat inflationary gap, pemerintah umumnya mengusahakan menurunkan tingkat pendapatan dengan maksud untuk menghilangkan infaltionary gap.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir disegala bidang ekonomi.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, pendidikan, penyediaan fasilitas, pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran daerah diperoleh dari seluruh pendapatan daerah yang diterima baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadiln Keuangan Negara Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan penanganannya dalam bagan atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Belanja klasifikasi berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi dua bagian.

2.1.3.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja pegawai yang tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang dianggarkan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial , belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.

2.1.3.3 Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terkait secara langsung dengan pelaksanaannya program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Belanja langsung pada umumnya dibagi Menjadi 3 jenis yaitu

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran Honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai Manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian /pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti tanah, Mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

2.1.3.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat Output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro Teori mikro.

Mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang – barang publik dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu: Perubahan permintaan akan barang publik, Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan, Perubahan kualitas barang publik, Perubahan harga faktor – faktor produksi.

2. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro.

1. Teori Keynes.

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam

pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian. Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier effect) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

2. Teori Rostow dan Musgrave.

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang didasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa Negara. Model ini menghubungkan tahap – tahap pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Di tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas – aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

3. Teori Wagner.

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurutya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang disebut *organic theory of state*. Teori tersebut menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, Perkembangan demografi.

Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan antara industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar.

2.1.3.4.1 Jenis Jenis Pengeluaran Pemerintah

Menurut (Suparmoko,1994) Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.
4. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Maka pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya pengeluaran untuk jasa negara, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak self liquidating maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan dalam kaitannya jasa-jasa tadi. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif

dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.

4. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah. Belanja rutin terdiri atas:

1. Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dan segala macam tunjangan.
2. Belanja Barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
3. Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terjaga dengan baik.
4. Belanja Perjalanan, yaitu biaya perjalanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset Negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan umum yang bersifat menambah modal masyarakat

dalam bentuk pembangunan baik sarana maupun prasarana fisik dan nonfisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi, juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus dipertimbangkan siapa yang akan dikerjakan atau meningkatnya pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Pengeluaran pemerintah adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang barang publik dan pelayanan masyarakat. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah secara makro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar.

Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Sejalan yang dikatakn Musgrave, jika pendapatan perkapita meningkat maka akan secara relative pengeluaran pemerintah akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas pendapat lain dalam meningkatkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dapat dibagi dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih baik.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 1993 : 169). Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurut Dumairy (1999 : 56) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

1. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.

4. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Sementara itu menurut Sadono Sukirno (1994 : 168 - 169) ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah dalam satu periode yaitu :

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Ada kecenderungan semakin banyak pajak yang diterima maka semakin besar pengeluaran yang dilakukan.
2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah Tujuan – tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah yaitu mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Maka diperlukan dana yang besar yang salah satunya bersumber dari pajak. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran perlu diadakan perbaikan jalan dan sarana lainnya guna meningkatkan minat investasi swasta, Sering kali penerimaan yang berasal dari pajak tidak mencukupi maka terkadang keputusan untuk mencetak uang baru merupakan jalan yang diambil pemerintah.
3. Pertimbangan politik dan keamanan Stabilitas politik sering kali berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Seperti perang yang melanda suatu Negara. Hal ini tentu berdampak pada besarnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai perang, yang pada akhirnya juga mengganggu iklim investasi di Negara yang bersangkutan karena alasan keamanan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Peranaan Pemerintah dalam suatu Negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telkomonikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang efesien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khusus pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat diciptakan lapang usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakn fiskal yaitu sutau tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk Nasional dan APBD untuk daerah dan wilayah. Tujuan dari kebijakn fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga ,tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tinjaun pustaka dari penelitian adalah dijelaskan secara sistematis tentang hasil- hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dari berhbungan dengan penelitian yang di lakukan. Hasil penelitian terdahulu di uraikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun	Judul	Hasil dan Analisis
1.	Nurul Fitriani(2018	Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015	Analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi linier berganda dengan model <i>common effect</i> yang diolah dengan menggunakan <i>evIEWS-8</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,0644. 2) Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas 0,0001. 3) Secara simultan Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,000000. 4) Nilai <i>Adjusted R-squared</i> dalam penelitian ini adalah 0,517457 berarti nilai kontribusi seluruh variabel independen dalam

			menjelaskan variabel dependen sebesar 51,74%.
2.	Nurafuah (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari instansi-instansi terkait dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif serta regresi linier berganda, penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Jumlah Usaha, Investasi, dan Upah Minimum Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi pengelola UKM sebaiknya memanfaatkan rekan bisnis pelatihan usaha, buku dan internet dalam mencari informasi pasar dan cara manajemen usaha agar usahanya dapat berkembang lebih efektif.

3.	Alvia Ayu Anggra eny(201 5)	Analisis Pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja,dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota surkarta.	Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data <i>time series</i> Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regrensi linear berganda

4.	Oktavia na Dwi Saputri (2011)	Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Di Kota Salatiga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah dan produktivitas tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Salatiga. Secara parsial, upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Salatiga dan produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga. Besarnya pengaruh upah dan produktivitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di kota salatiga sebesar 95,16% sedangkan sisanya 4,48% di terangkan oleh faktor lain.
----	--	---	---

5.	Roni Akmal (2010)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2003-2007, secara umum terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi. Variabel PDRB secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, ceteris paribus, namun hal ini bertolak belakang dengan hipotesis di mana UMP berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan penyerapan tenaga kerja akibat kenaikan UMP diduga lebih dirasakan pada kelompok tenaga kerja terdidik. Selain itu juga diduga akibat tingginya permintaan tenaga kerja di sektor jasa-jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Kenaikan investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
----	-------------------------	---	--

--	--	--	--

1.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

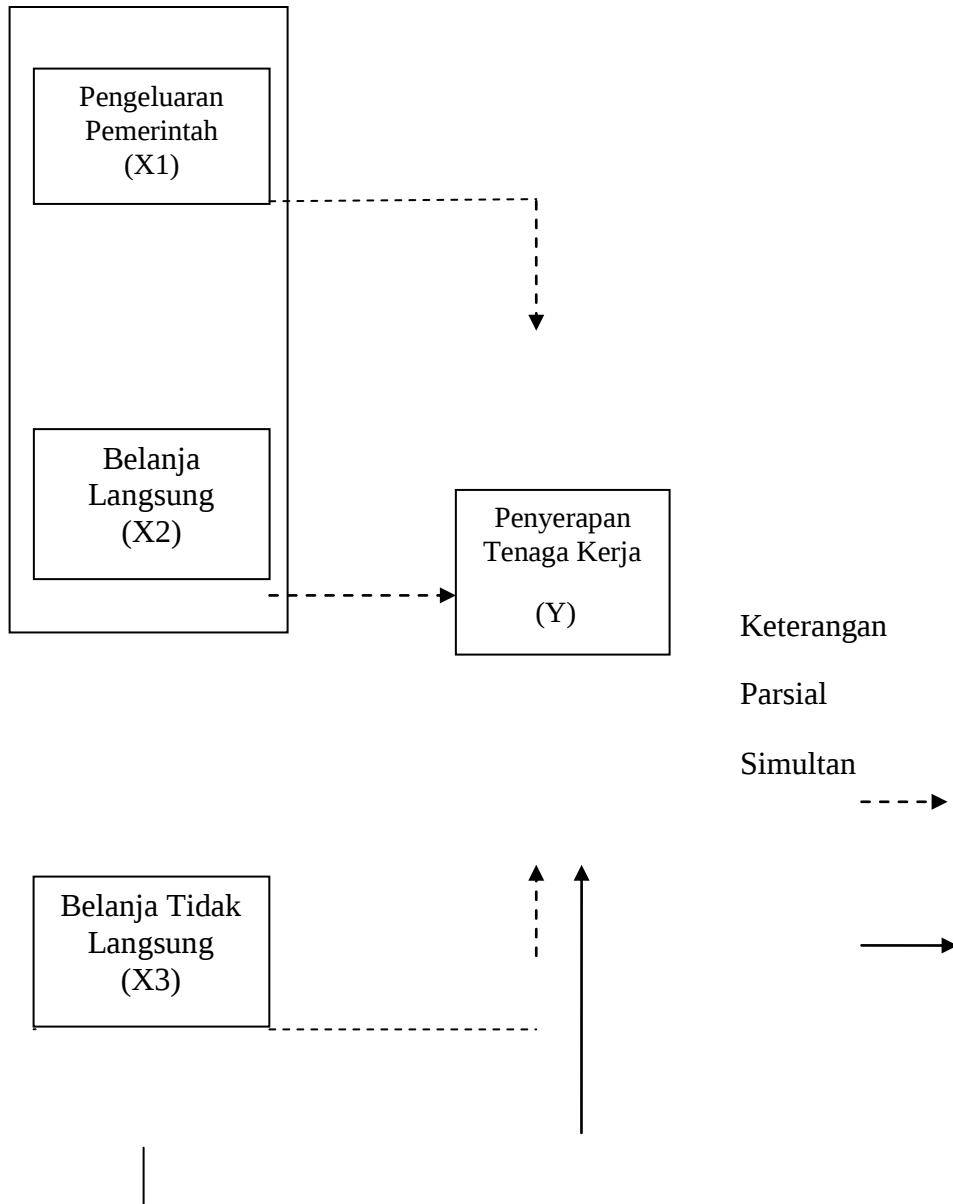
Berdasarkan dari landasan teori diatas, penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah pembangunan ekonomi disuatu daerah sudah berjalan dengan baik atau belum. Suatu daerah mampu semakin banyak menyerap masyarakatnya untuk diberikan pekerjaan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah tersebut sudah baik. Penyerapan tenaga kerja secara tidak langsung dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Oleh karena keterbatasan waktu, maka penelitian ini hanya akan membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang berwujud pada dana-dana pembiayaan.

Pengeluaraan pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, dengan kata lain untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan anatar golongan, dilaksanakan melalui bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang dapat merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Hal ini berarti dapat memperluas lapangan dan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja hanya dapat terlaksana dengan jalan meluaskan dasar kegiatan ekonomi, tetapi perluasan dasar ekonomi ini harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang pada umumnya menghambat produksi di Negara-negara berkembang adalah produktivitas yang rendah disertai dengan kurangnya penggunaan secara penuh terhadap angkatan kerja. Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja guna untuk pembangunan ekonomi kea rah yang lebih baik.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran Teoritis



2.5 Hipotesis Skripsi

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Berdasarkan landasan teori maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga Pengeluaran Pemerintah, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif secara Parsial Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.
2. Diduga Pengeluaran Pemerintah, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif Secara Simultan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.